



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Sidang | : 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : I |
| Rapat Ke | : 10 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Senin, 18 November 2019 |
| Waktu | : Pukul 14.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 |
| Acara | : 1. Membahas Hasil Pengawasan KPAI terhadap Perlindungan Anak dan Rekomendasinya. |
| Ketua Rapat | : DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, |
| Sekretaris Rapat | : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. |
| Hadir | : 1. 36 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN 3. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Beserta Jajaran. |

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.53 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, dengan didampingi Ketua Komisi VIII H.Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua H.M. Ihsan Yunus, BA,B. Comm, ME. Con, Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

I. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan agenda "**Hasil Pengawasan KPAI terhadap Perlindungan Anak dan Rekomendasinya**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI berpendapat dan berpandangan bahwa Pagu Anggaran tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebesar Rp11.403.767.000,- (*Sebelas miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) tidak memadai sehingga diupayakan adanya penambahan pada APBN-P Tahun 2020.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar sungguh-sungguh meningkatkan kinerja, memperhatikan serta menindaklanjuti untuk menyelesaikan berbagai persoalan anak di Indonesia, namun agar pelaksanaan perlindungan anak lebih optimal hendaknya memperhatikan saran dan pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Melakukan penguatan kelembagaan internal dan eksternal Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi yang optimal.
 - b. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan lintas sektor, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk mendukung kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan anak.
 - c. Adanya data berbagai permasalahan anak yang disampaikan dalam bentuk laporan yang lebih rinci, lengkap dan fakta di lapangan berbasis wilayah disertai kendala dan hambatan yang ada, sehingga menjadi bahan masukan bagi Komisi VIII DPR RI untuk menindaklanjuti di Kementerian/Lembaga.
 - d. Meningkatkan kepedulian dan cepat tanggap terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh anak Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB..

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA**

DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si,